

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP**



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	62
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
BAB IV PENUTUP	78
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: *Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja.*

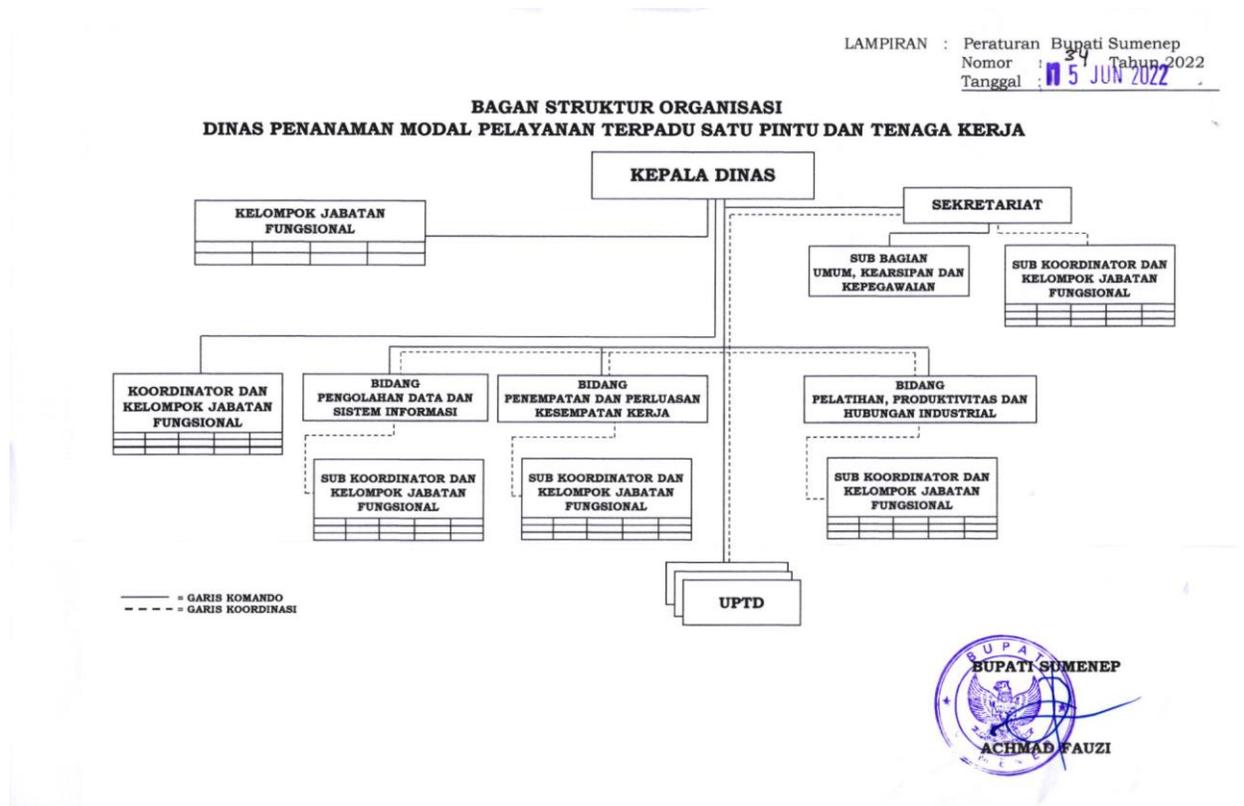
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan

- nonperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Membangun sistem manajemen mutu pada aspek pelayanan publik;
2. Mengembangkan kelembagaan pelayanan penanaman modal yang efisien (PTSP) berbasis IT dengan kualitas tersertifikasi (ISO);
3. Meningkatkan kapasitas SDM dengan proaktif mengirimkan pada pelatihan-pelatihan bersertifikat;
4. Tuntutan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
5. Pengembangan aplikasi IT untuk layanan perijinan investasi dan komunikasi dengan stakeholders;
6. Proaktif mengajukan penyediaan pendanaan untuk sarana dan prasarana perkantoran;
7. Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan;
8. Mengoptimalkan sarana pelayanan yang ada untuk memberikan pelayanan prima pada public;

9. Belum semua sektor dan jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP&NAKER;
10. Perlunya menguatkan UMKM, pertanian dan industri olahan perikanan sebagai daya tarik investasi daerah untuk menyerap tenaga kerja dan mengakselerasi pertumbuhan;
11. Kemampuan daya saing tenaga kerja belum optimal perlu sertifikasi uji kompetensi;
12. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
13. Perluasan daya serap lapangan kerja dan kemitraan Pemerintah dengan dunia swasta untuk mengurangi pengangguran; serta
14. Terbatasnya lokasi dan kuota transmigrasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. melakukan promosi dan apresiasi penanaman modal kepada pelaku usaha (investor) melalui kegiatan Sumenep Investment Summit (SIS) dengan melibatkan para pelaku usaha dalam kegiatan tersebut;
2. menyusun/membuat system informasi pelayanan terintegrasi (sinanti) terkait proses perizinan non perizinan media luar ruang/papan reklame, dari proses pendaftaran, pembayaran retribusi sampai keluar ijin secara online dan selanjutnya akan dikembangkan terintegrasi juga dengan perizinan non perizinan lainnya;
3. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi kepada para tenaga kerja dengan system 3 in 1, selain diberi sertifikat bagi peserta pelatihan juga di fasilitasi akses permodalan dan NIB bagi usaha mandiri;
4. melaksanakan Job Fair/bursa kerja bagi para tenaga kerja dalam rangka menyerap tenaga kerja sesuai bidang keahlian.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 121 Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah:

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Membangun kualitas sumberdaya manusia (SDM) berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir;
- Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat;
- Misi 4 : Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan berkarifan local;

Misi 5 : Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi mengacu pada RPJMD yaitu Misi ke satu, kedua dan ketiga dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diintervensi sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang Diintervensi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
1	Membangun kualitas sumberdaya manusia (SDM) berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan daerah	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Nilai IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,78	2,72	2,66	2,58	2,52
		1.1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labor Supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,05	75,10	75,15	75,20	75,25
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00
		2.1	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,61	3,67	3,73	3,79	3,85
3	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government			Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	70	80	90	95	100
		3.1	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	85	86	88,50	90,50	95

Sumber : Renstra DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep periode 2022-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pasokan Tenaga Kerja (Labour Supply)	1.1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Prosentase	Persentase jumlah Angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas)	$TPAK = PK/PUK \times 100\%$ PK = penduduk yang bekerja PUK = penduduk usia kerja	BPS Sumenep
2	Meningkatnya Iklim investasi	2.1. Persentase peningkatan realisasi investasi	Persentase	Persentase jumlah realisasi investasi tahun ke n terhadap jumlah realisasi investasi tahun n-1	$(RIT)-(RIT-1)/(RIT-1) \times 100\%$ RIT = realisasi investasi tahun n RIT-1 = realisasi investasi tahun sebelumnya	DPMPTSP dan Tenaga Kerja
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	3.1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Nilai	Nilai kepuasan masyarakat terhadap unit layanan perizinan dan non perizinan	Jumlah NRR per unsur x 0,11 Jumlah NRR IKM tertimbang x 25 = IKM unit layanan	DPMPTSP dan Tenaga Kerja

Sumber : Indikator Kinerja Utama DPMPTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan revidi/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 ([link : https://drive.google.com/file/d/1bnpgZkxhqfQxyri9vt1wwfThwrTdDSrz/view?usp=drive_link](https://drive.google.com/file/d/1bnpgZkxhqfQxyri9vt1wwfThwrTdDSrz/view?usp=drive_link)) serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja ([link : https://drive.google.com/file/d/1OTjtXnkJTVYkUfPH7Q9hqxQIRpynO-Dr/view?usp=drive_link](https://drive.google.com/file/d/1OTjtXnkJTVYkUfPH7Q9hqxQIRpynO-Dr/view?usp=drive_link)). Berikut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023, sebelum revidi dan sesudah revidi :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023 Sebelum Revidi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,72
		1.1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (Labor Supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,10
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	%	7,30

		2.1	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	82,88
3	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government			Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	%	80
		3.1	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Perizinan dan Nonperizinan	%	82,87

Sumber : Rencana Kerja DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2023

Pada tabel 2.4 tersebut tidak terdapat perubahan yang mendasar terhadap Rencana Kerja Tahun 2023 hasil revidi, tujuan dan sasaran serta indikator masih tetap sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal

25 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada tanggal 20 bulan Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

**Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	5	
1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	-	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	75,10	75,15
2	Meningkatnya iklim investasi	-	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	82,88	56,50
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	-	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	%	82,87	-

		-	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	%	82,87	86,50
--	--	---	---	---	-------	-------

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2023

Adapun Perubahan perjanjian kinerja sebagaimana Tabel. 2.5 tersebut diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Dari target sebelumnya terdapat evaluasi pada pelaksanaan anggaran dan realisasi investasi pada triwulan III tahun 2023 masih mengalami stagnansi dan dimungkinkan para pelaku usaha/investor wait and see terhadap situasi kondisi suhu politik tahun 2023 sehingga masih enggan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sumenep. Maka DPMPTSP dan Tenaga Kerja mencoba realistis terhadap target kinerja iklim investasi tersebut, oleh karenanya dilakukan perubahan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 diatas 1,01% dari realisasi 2022 (55,95%) menjadi **56,50%**.
2. Indikator kinerja seperti “tingkat partisipasi Angkatan kerja” dinaikkan 1,00% dari realisasi 2022 (75,12%) menjadi **75,15%**, dimana untuk TPAK menurut sumber BPS Kabupaten Sumenep pada bulan Agustus 2023 TPAK Kabupaten Sumenep naik dan data tersebut akan di rilis pada Pebruari 2024.
3. Indikator kinerja SKM dinaikkan 1,04% dari realisasi 2022 (86,25%) menjadi **86,50%**, karena melihat potensi layanan yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik pada triwulan III masyarakat dalam mengurus perizinan dan nonperizinan masih akan meningkat serta implementasi terhadap nonperizinan media luar ruang sudah melalui system aplikasi yaitu SINANTI (sistem pelayanan perizinan terintegrasi) dari pengurusan izin sampai pembayaran pajak/retribusi sudah terintegrasi dalam satu sistem, maka dengan realistis dilakukan peningkatan target SKM.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6

**Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</u>					
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	4,94	4,94	1.165.742.637	1.952.404.937
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat</i>	85	85	1.114.240.987	1.149.240.857
	Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	80	80	1.114.240.987	1.149.240.857
	<i>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi</i>	85	85	10.019.300	800.284.080
	Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	42	42	10.019.300	800.284.080
	<i>Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>	<i>Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil</i>	3,50	3,50	41.431.350	2.880.000
	Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	82	82	41.431.350	2.880.000

	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	75,51		148.567.460	29.998.700
	<i>Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase partisipasi Angkatan kerja</i>	-	41,26		29.998.700
	Sub kegiatan penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	-	30		29.998.700
	<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi pasar</i>	<i>Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	80,60	-	113.567.590	-
	Sub kegiatan Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	750	-	27.689.640	-
	Sub kegiatan job fair/bursa kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	55	-	85.877.950	-
	<i>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase PMI yang dilayani</i>	75,51	-	34.999.870	-
	Sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	45	-	34.999.870	-

2	Program Hubungan Industrial	Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	100	100	635.214.840	292.282.400
	<i>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB</i>	27	27	52.804.900	4.100.000
	Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	27	27	52.804.900	4.100.000
	<i>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan</i>	100	100	582.409.940	288.182.400
	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	22	22	82.129.440	4.800.000
	Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2450	2274	500.280.500	283.382.400
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</u>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	8.479.706.117	8.622.448.490
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran</i>	12	12	5.019.100	5.019.100

		<i>dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>				
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3.308.800	3.308.800
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	720.800	720.800
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	989.500	989.500
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	12	12	7.272.547.841	7.331.537.009
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	72	7.272.547.841	7.331.537.009
	<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>	-	1	-	44.055.900
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	-	98	-	44.055.900

		Kelengkapan				
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	96	96	148.775.800	166.360.200
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	8.451.900	14.550.100
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	10.092.650	10.092.650
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	20.112.900	20.112.900
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	12	12	10.837.000	10.838.200
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	45.752.000	27.725.000
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126	136	52.172.000	81.657.000
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	1.357.350	1.357.350
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	--	70		39.274.619

	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	8	-	39.274.619
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa yang disediakan</i>	3	3	820.383.409	816.153.265
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	1000	1.798.000	1.798.000
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	237.792.819	233.562.675
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	17	580.792.590	580.792.590
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jenis barang yang dipelihara</i>	6	6	232.979.967	220.048.397
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	36	40.900.000	61.060.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	63	26.180.000	16.180.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	165.899.967	132.808.397

		yang Dipelihara/Di rehabilitasi				
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,61	3,61	311.030.800	111.030.800
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</i>	5	2	311.030.800	111.030.800
	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	1	311.030.800	111.030.800
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,61	3,61	134.236.865	134.236.865
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	6173	6173	134.236.865	134.236.865
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6173	6173	80.991.720	80.991.720
	Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat	24	24	44.176.225	44.176.225

		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				
	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	11	11	9.068.920	9.068.920
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya	83	83	417.380.570	592.378.777
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</i>	<i>6173</i>	<i>6173</i>	<i>417.380.570</i>	<i>592.378.777</i>
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	35	-	174.998.207
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	240	240	273.306.970	273.306.970
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi	101	101	144.073.600	144.073.600

		dan Sinkronisasi Pengawasan				
5	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	87	87	96.429.500	56.732.000
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</i>	100	100	96.429.500	56.732.000
	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	4	96.429.500	56.732.000
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</u>					
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	82,50	82,50	14.999.800	2.261.400
	<i>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi</i>	3	3	14.999.800	2.261.400
	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	24	2	14.999.800	2.261.400

Sumber : DPA dan DPPA Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan

Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat penganagguran terbuka (TPT)	2,72%	1,71%	137,13%	Sangat Tinggi	BPS Sumenep (https://drive.google.com/file/d/1HsetcMAQX1bgMI6nkRS_gAZLUS0jloZc/view?usp=drive_link)
	Sasaran : Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	75,15%	78,86%	104,94%	Sangat tinggi	BPS Sumenep (https://drive.google.com/file/d/1HsetcMAQX1bgMI6nkRS_gAZLUS0jloZc/view?usp=drive_link)
2	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,30%	4,95%	132,2%	Sangat Tinggi	BPS Sumenep (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6rEwDRSeA1ju9IQQSFKwLES4lySoJ_o/edit?usp=drive_link&ouid=100892802445238282547&rtfpf=true&sd=true)
	Sasaran : Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	56,50%	18,26%	32,32%	Sangat rendah	DPMP TSP dan Tenaga Kerja (https://drive.google.com/file/d/19aHJjEIEAC3RIuYDTcdEW6P_

							28RF_osd/view?usp=drive_link
3	Tujuan : Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Prosentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	80%	89,29%	111,61%	Sangat tinggi	DPMPTSP dan Tenaga Kerja https://drive.google.com/file/d/1A_i0H0JwWQ2jIOwCW7NBN06d_U9Us3O6T/view?usp=drive_link
	Sasaran : Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	86,50%	88,25%	102,02%	Sangat tinggi	DPMPTSP dan Tenaga Kerja https://drive.google.com/file/d/1M1HtrvYUOjiyJj5q8B_ohzMv5T3qEQRS/view?usp=drive_link
	Rata-rata Capaian Kinerja				103,37	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

1. Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sumenep pada Agustus 2023 sebesar 926,62 ribu orang atau mengalami kenaikan 28,90 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep. Sebanyak 730,75 ribu orang atau sekitar 78,86 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Sumenep pada Agustus 2023 terdiri dari 718,28 ribu orang bekerja dan 12,46 ribu orang menganggur.
2. Secara kumulatif realisasi investasi di Kabupaten Sumenep periode Januari - Desember 2023 mencapai Rp. 2,101 triliun, capaian realisasi investasi tahun 2023

year on year (y-o-y) tumbuh 18,26% terhadap realisasi tahun 2022 (Rp. 1,777 triliun) mengalami penurunan pertumbuhan realisasi investasi dibandingkan tahun 2022. Terhadap realisasi investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 45.415 orang diberbagai bidang usaha, berbagai upaya terus kita dilakukan seperti peningkatan digitalisasi layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi potensi investasi guna meningkatkan iklim berinvestasi di Kabupaten Sumenep. Capaian sangat rendah karena dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja perubahan masih tinggi, oleh sebab itu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 target kinerja disesuaikan berdasarkan Renstra Perubahan Perangkat Daerah.

3. Hasil survey kepuasan masyarakat yang mengalami peningkatan tiap tahunnya menjadi bukti bahwa layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep, hal ini menunjukkan MPP selalu melakukan perbaikan setiap tahunnya dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap layanan public Kabupaten Sumenep.

Adapun rata-rata capaian kinerja IKU Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebesar 79,76% dengan kategori “Tinggi”.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,78%	1,36%	48,92%	2,72	1,71	137,13
	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	75,05%	75,12%	100,09%	75,15%	78,86%	104,94%
2	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	7,40%	8,27%	111,76%	7,30%	4,95%	132,2%
	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	82,82%	55,95%	67,55%	56,50%	18,26%	32,32
3	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	70%	89,29	127,55%	80%	89,29%	111,61%
	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	82,81%	86,25%	104,15%	86,50%	88,25%	102,02%

Uraian penjelasan tabel :

1. Dari table tersebut dapat diketahui untuk capaian tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan” tahun 2023 sebesar 137,13% dan pada tahun 2022 tercapai 48,92% dengan demikian maka tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 88,21%. Hal ini berbanding lurus dengan sasaran “Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)” pada indicator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”

yaitu pada tahun 2023 sebesar 78,86% dan pada tahun 2022 sebesar 75,12% dengan demikian maka tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,74%. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep.

2. Untuk capaian tujuan “Meningkatkan ekonomi sector unggulan” tahun 2023 dengan indicator ICOR sebesar 132,2% dan pada tahun 2022 tercapai sebesar 111,76%, dengan demikian tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,43%, Sedangkan capaian terhadap sasaran dengan indicator prosentase peningkatan realisasi investasi pada tahun 2023 tercapai sebesar 32,32% dan untuk tahun 2022 sebesar 67,55%, dengan demikian maka tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 35,27%. Akan tetapi secara kumulatif realisasi investasi year on year (y-o-y) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti tahun 2023 terealisasi Rp. 2,101 triliun dibandingkan realisasi tahun 2022 Rp. 1,777 triliun.
3. Sedangkan untuk capaian tujuan “Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government” dengan indicator Nilai IKM pada saat hasil reuiu dengan KemenPAN-RB indicator tersebut tidak dapat menjadi ukuran terhadap tjuan tersebut dan tidak relevan, maka atas penilaian tersebut kami ubah menjadi “Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government” dengan capaian sebesar 111,61% dan untuk tahun 2022 tercapai sebesar 127,55%, dengan demikian tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 15,94%. Sedangkan untuk capaian sasaran “Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat” dengan indicator Hasil survey keputusan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan tahun 2023 sebesar 102,02% dan untuk tahun 2022 sebesar 104,15%, dengan demikian tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,13%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	1,71%	2,52%	122,43%
	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	78,86%	75,25%	104,8%
2	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	4,95%	7%	123,97%
	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	18,26%	3,85%	474,3%
3	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	89,29%	100%	89,29%
	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	88,25%	95,00%	92,89%

Uraian penjelasan tabel :

1. Dari table diatas dapat diketahui bahwa dari realisasi kinerja tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan” tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 122,43% (kategori sangat tinggi), dengan demikian target kinerja untuk 3 tahun kedepan telah terpenuhi, dimana semakin rendah realiasi kinerja untuk indicator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menekan angka pengangguran . Sedangkan capaian sasaran dengan indicator Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami kemajuan terhadap sasaran target yang akan dicapai pada tahun akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2026 yaitu sebesar 104,8% artinya sebelum akhir renstra target sudah terpenuhi.
2. Untuk tingkat capaian tujuan “meningkatnya ekonomi sector unggulan” pada table diatas dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan sebesar 123,97% dan telah tercapai target akhir tahun 2026, artinya semakin rendah realisasi ICOR maka tingkat pertumbuhan ekomoni akan semakin meningkat, dimana pertumbuhan ekonomi 2023 Kabupaten Sumenep sebesar 5,35% dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,11% dengan ICOR sebesar 8,27%. Dan untuk sasaran indicator prosentase peningkatan realisasi investasi tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir yahun 2026 mengalami kamajuan 474,3% berarti sebelum akhir tahun 2026 sudah mencapai target dan mengalami kenaikan/kemajuan yang sangat baik.
3. Pencapaian target tujuan “Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government” seperti pada table diatas dibandingkan dengan target tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 89,29%, dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun kedepan sebesar 10,71 atau sebesar 10,71% dari target tahun 2026. Sedangkan capaian sasaran hasil survey kepuasan masyarakat dibandingkan target akhir 2026 mencapai tingkat kemajuan 92,89%, dengan

demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun kedepan sebesar 6,75 atau sebesar 6,75% dari target tahun 2026

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	1,71%	5,32%	32,14%
	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	78,86%	69,48%	113,50%
2	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremental capital output ratio (ICOR)	4,95%	7,6%	65,13%
	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	18,26%	17,5%	104,34%
3	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government	89,29%	-	-
	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	88,25%	87,61%-	100,73%

Uraian penjelasan Tabel :

1. Dari table diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 TPT Kabupaten Sumenep (1,71%) dibandingkan dengan TPT Nasional (5,32%) masih lebih rendah Kabupaten Sumenep dan menunjukkan sangat baik. Sedangkan untuk

TPAK Kabupaten Sumenep tahun 2023 (78,86%) dibandingkan dengan Nasional (69,48%) lebih tinggi Kabupaten Sumenep.

2. Bahwa untuk tahun 2023 ICOR Kabupaten Sumenep (4,95%) dibandingkan dengan Nasional tahun 2023 (7,6%) lebih rendah Kabupaten Sumenep, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan prosentase peningkatan realisasi investasi Kabupaten Sumenep tahun 2023 (18,26%) dibandingkan dengan Tingkat Nasional tahun 2023 (17,5%) pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Sumenep lebih baik (0,76 poin) daripada nasional.
3. Untuk perbandingan persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-government tidak ada baik nasional maupun kabupaten/kota. Sedangkan nilai SKM perizinan dan non perizinan tahun 2023 (88,25%) dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo tahun 2023 (87,61%) SKM Kabupaten Sumenep masih lebih baik (0,64 poin).

Keberhasilan kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk tingkat keberhasilan kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengkategorian Tingkat Keberhasilan Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	% Capaian
1	Sangat Berhasil	>100
2	Berhasil	91 ≤ 100
3	Cukup Berhasil	76 ≤ 90
4	Tidak Berhasil	66 ≤ 75
5	Sangat Tidak Berhasil	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Tingkat Keberhasilan	Solusi/upaya peningkatan yang ada (telah dan/atau akan dilakukan)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat pengang guran terbuka (TPT)	2,72%	1,71%	137,13%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan
	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat partisipa si Angkatan kerja (TPAK)	75,15%	78,86%	104,94%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan
2	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	Incremen tal capital output ratio (ICOR)	7,30%	4,95%	132,2%	Sangat berhasil	Telah dilakukan
	Meningkatnya iklim investasi	Persenta se peningk atan realisasi investasi	56,50%	18,26%	32,32%	Sangat Tidak Berhasil	Telah dilakukan dan akan ditingkatkan
3	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Persenta se layanan perizina n yang dikelola melalui layanan e-goverme nt	80%	89,29%	111,61%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan

	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	86,50%	88,25%	102,02%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja TPT Kabupaten Sumenep tahun 2023 (1,71%) sebenarnya sangat berhasil karena semakin kecil nilai TPT suatu daerah menunjukkan bahwa keberhasilan daerah tersebut dalam menekan angka pengangguran dan kesempatan kerja semakin baik, hal ini didukung oleh :
 - a. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Sumenep, yaitu sebesar 8,54 persen disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki TPT sebesar 4,46 persen.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi semakin tahun semakin meningkat, dimana selain pelatihan kerja sesuai basic keahlian juga mendapatkan fasilitasi pengurusan NIB (jika melanjutkan usahanya), fasilitasi permodalan ke perbankan dan sertifikat kompetensi.
- b. Pelaksanaan Bursa Kerja/Job Fair yang dilakukan setiap tahun guna memberikan ruang/ peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2023 untuk dilaksanakan tahun 2024 terdiri dari :

- a. Melakukan reuiu rencana kerja tahunan program/kegiatan pendukung ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada masyarakat guna peningkatan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
- b. Melakukan reuiu penyusunan pohon kinerja perangkat daerah dengan pohon kinerja kabupaten agar lebih berkesesuaian dengan Menyusun rencana kerja anggaran berdasarkan pohon kinerja hasil reuiu.

Sedangkan Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Sumenep tahun 2023 (78,86%) mengalami peningkatan berbanding lurus dengan nilai TPT, hal ini didukung oleh :

- a. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 bertambah dari 674,37 ribu orang menjadi sebanyak 730,75 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,56 persen, naik 1,33 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2022.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Melakukan upaya meningkatkan upah minimum kabupaten (UMK) dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- b. Pelatihan perempuan melalui pelatihan kompetensi sesuai bidang keahlian.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2023 untuk dilaksanakan tahun 2024 terdiri dari :

- a. Peningkatan pembinaan produktivitas perusahaan terhadap perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama.
- b. Menambah volume pelaksanaan job fair/bursa kerja yang semula hanya satu kali, menjadi 2 kali sesuai dengan peluang/kesempatan kerja di daerah.
- c. Menambah jumlah peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.

2. Tercapainya indicator ICOR Kabupaten Sumenep tahun 2023 (4,95%) dibanding tahun 2022 (8,27%) lebih baik, karena ICOR yang baik adalah antara 3 - 4 dengan ICOR 4,95% tahun 2023 Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini didukung oleh :
 - a. Nilai Produk domestic regional bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan tahun 2023 sebesar 5,35% dibandingkan tahun 2022 3,11%, hal ini berbanding terbalik dengan nilai ICOR semakin tinggi PDRB maka nilai ICOR semakin rendah.
 - b. Pembentuk ICOR adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan mesin- mesin dan alat angkutan. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Pembinaan pelaku usaha terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya melalui pendampingan pelaporan LKPM.
- b. Pelaksanaan sosialisasi pentingnya mengurus izin usaha melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian penanaman modal.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2023 untuk dilaksanakan tahun 2024 terdiri dari :

- a. Melakukan reuiu rencana kerja tahunan (RKT) disesuaikan yang tertuang dalam perencanaan strategis perangkat daerah.

Sedangkan tercapainya indicator persentase peningkatan realisasi investasi Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 sebesar (18,26%) mengalami penurunan

pertumbuhan realisasi investasi dibandingkan tahun 2022 (59,55%), akan tetapi secara kumulatif realisasi investasi year on year (y-o-y) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti tahun 2023 terealisasi Rp. 2,101 triliun dibandingkan realisasi tahun 2022 Rp. 1,777 triliun, hal ini disebabkan oleh :

- a. Banyak pelaku usaha yang masih melakukan wait and see terhadap kondisi geopolitik daerah akibat pelaksanaan persiapan kampanye pemilu 2024.
- b. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB atas usahanya.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Pembinaan pelaku usaha dan sosialisasi terhadap kewajiban akan pelaporan pelaksanaan usaha melalui LKPM.
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha bagi investor yang berizin akan kesesuaian izin usaha yang dikeluarkan dengan kegiatan usaha.
- c. Pelaksanaan Sumenep Investment Summit (SIS) dalam bentuk bussines forum sebagai upaya promosi memperkenalkan kepada pelaku usaha/investor potensi investasi di Kabupaten Sumenep.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2023 untuk dilaksanakan tahun 2024 terdiri dari :

- a. Melanjutkan pembinaan pelaku usaha melalui pendampingan terhadap kewajiban pelaporan kegiatan usaha (LKPM).
 - b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha baik yang berizin juga menysasar kegiatan usaha yang belum berizin melalui tim TP3.
 - c. Pelaksanaan pameran promosi investasi dan bussines forum untuk melakukan promosi guna menyerap investor sebanyak-banyaknya.
3. Pencapaian indicator tujuan persentase layanan perizinan yang dikelola melalui layanan e-goverment tahun 2023 sebesar 89,29% merupakan hasil peningkatan inovasi layanan yang dilaksanakan di MPP guna memberikan kenyamanan layanan perizinan dan nonperizinan, hal ini didukung oleh :

- a. Jumlah layanan berbasis e-government semakin meningkat dari 28 jenis izin yang dikelola di MPP sebanyak 25 jenis layanan yang dikelola berbasis e-government hanya 10,71% yang belum e-government.
- b. Layanan nonperizinan media luar ruang telah terintegrasi dalam satu system dari pendaftaran sampai pembayaran retribusi melalui aplikasi SINANTI.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Melakukan pengembangan system aplikasi SINANTI melalui menu layanan nonperizinan lainnya.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2023 untuk dilaksanakan tahun 2024 terdiri dari :

- a. Peningkatan digitalisasi system dan website di MPP dalam rangka peningkatan layanan public.

Sedangkan peningkatan indikator survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public (perizinan dan non perizinan) di MPP dalam percepatan penerbitan layanan perizinan dan non perizinan tahun ke tahun semakin membaik, hal ini didukung oleh :

- a. Evaluasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang secara rutin setiap triwulan terhadap percepatan penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public di MPP selalu dilakukan pemeliharaan.
- c. Peningkatan kemudahan terhadap layanan public melalui system online terus dilakukan pengembangan.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Peningkatan system SKM online salah satu upaya memberikan kemudahan dalam memberikan penilaian terhadap layanan public di MPP.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2023 untuk dilaksanakan tahun 2024 terdiri dari :

- a. Peningkatan digitalisasi system layanan online.
- b. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana disabilitas

Analisis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan disajikan pada tabel berikut .:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	104,94%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Berhasil
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat</i>	140	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	140	Berhasil
				<i>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi</i>	100	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan	Jumlah Lembaga Pelatihan	42	Berhasil

				Pelatihan Kerja Swasta	Kerja Swasta yang Dibina		
				<i>Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>	<i>Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil</i>	100	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	82	Berhasil
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	100	Berhasil
				<i>Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase partisipasi Angkatan kerja</i>	100	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20	Berhasil
				Program Hubungan Industrial	Presentase Pengesahan Peraturan	100	Berhasil

					Perusahaan		
				<i>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB</i>	27	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	22	Berhasil
				<i>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan</i>	100	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	22	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terlaksanaan Program Jaminan Sosial	2274	Berhasil

				dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	Berhasil
				<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penanggara n dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	12	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Berhasil
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Berhasil
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	4	Berhasil

					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	12	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Berhasil
				<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>	1	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	97	Berhasil
				<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	90	Berhasil

				Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Berhasil
				Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Berhasil
				Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Berhasil
				Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	12	Berhasil
				Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Berhasil
				Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	136	Berhasil

				konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Berhasil
				<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	5	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Berhasil
				<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa yang disediakan</i>	3	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3215	Berhasil
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Berhasil
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	17	Berhasil

					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
				<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah</i>	100	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Berhasil
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59	Berhasil
				Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3	Berhasil
2	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	205,80%	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	97,87%	Berhasil
				<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi</i>	<i>Jumlah Media Promosi</i>	3	<i>Berhasil</i>

				<i>Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penanaman Modal</i>		
				Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Berhasil
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan non perizinan	100,47%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100	Berhasil
				<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	14.211	<i>Berhasil</i>
				Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	14.211	Berhasil

					Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
				Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	24	Berhasil
				Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelola ya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	11	Berhasil
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahnya	222,04	Berhasil
				<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi</i>	<i>14.211</i>	<i>Berhasil</i>

				<i>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</i>		
				Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	35	Berhasil
				Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	240	Berhasil
				Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	101	Berhasil
				Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	Berhasil
				<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan</i>	<i>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non</i>	100	<i>Berhasil</i>

				<i>yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Perizinan Tepat Waktu</i>		
				Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	Berhasil
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	0%	Tidak Berhasil
				<i>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi</i>	0	<i>Tidak Berhasil</i>
				Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0	Tidak Berhasil

Uraian penjelasan tabel :

1. Program “pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja” target kinerja tercapai karena didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
2. Program “promosi pelaksanaan penanaman modal” target kinerja tercapai karena didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
3. Program “pelayanan penanaman modal” target kinerja tercapai karena didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.952.404.937	1.818.151.688	93,12%
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>1.149.240.857</i>	<i>1.032.317.646</i>	<i>89,83%</i>
	Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.149.240.857	1.032.317.646	89,83%
	<i>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>800.284.080</i>	<i>782.954.042</i>	<i>97,83%</i>
	Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	800.284.080	782.954.042	97,83%
	<i>Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>	<i>2.880.000</i>	<i>2.880.000</i>	<i>100%</i>
	Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	2.880.000	2.880.000	100%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	29.998.700	26.701.375	89,01%
	<i>Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota</i>	<i>29.998.700</i>	<i>26.701.375</i>	<i>89,01%</i>

	Sub kegiatan penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	29.998.700	26.701.375	89,01%
3	Program Hubungan Industrial	292.282.400	291.158.400	99,62%
	<i>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	4.100.000	4.100.000	100%
	Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	4.100.000	4.100.000	100%
	<i>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	288.182.400	287.058.400	99,61%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000	4.800.000	100%
	Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	283.382.400	282.258.400	99,60%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.622.448.490	7.766.796.330	90,08%
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.019.100	4.979.800	99,22%
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.308.800	3.276.000	99,01%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	720.800	719.200	99,78%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	989.500	984.600	99,50%
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	7.331.537.009	6.516.675.065	88,89%
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.331.537.009	6.516.675.065	88,89%
	<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	44.055.900	43.456.000	98,64%
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.055.900	43.456.000	98,64%
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	166.360.200	157.810.806	94,86%

	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.550.100	14.545.800	99,97%
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.092.650	10.092.500	100%
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	20.112.900	20.048.000	99,68%
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.838.200	10.769.000	99,36%
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.752.000	20.977.504	75,59%
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	81.657.000	80.024.002	98%
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.357.350	1.354.000	99,75%
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	39.274.619	39.108.333	99,58%
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.274.619	39.108.333	99,58%
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	816.153.265	797.037.783	97,66%
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	1.798.000	1.791.600	99,64%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.562.675	215.107.455	92,10%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.792.590	580.138.728	99,89%
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	220.048.397	207.728.543	94,40%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.060.000	49.786.960	81,54%
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.180.000	25.154.255	96,08%
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	132.808.397	132.787.328	99,98%
5	Program Promosi Penanaman Modal	111.030.800	108.671.246	97,87%
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	111.030.800	108.671.246	97,87%

	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	111.030.800	108.671.246	97,87%
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	134.236.865	126.838.987	94,49%
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	134.236.865	126.838.987	94,49%
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.991.720	77.439.287	95,61%
	Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	44.176.225	40.842.700	92,45%
	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9.068.920	8.557.000	94,36%
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	592.378.777	469.809.440	79,31%
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	592.378.777	469.809.440	79,31%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	174.998.207	129.579.500	74,05%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	273.306.970	228.789.640	83,71%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	144.073.600	111.440.300	77,35%
8	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	56.732.000	52.951.072	93,34%
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	56.732.000	52.951.072	93,34%
	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	56.732.000	52.951.072	93,34%

	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
9	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.261.400	0	0
	<i>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.261.400	0	0
	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.261.400	0	0
			Rata-Rata	92,10%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dengan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Tujuan</u>							
1	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	2,72%	1,71%	137,13%				
2	Meningkatkan ekonomi sector unggulan	7,30%	4,95%	132,2%				
3	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	80%	89,29%	111,61%				
	Rata-Rata			126,98%				
	<u>Sasaran</u>							
1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	75,15%	78,86%	104,94%	1.952.404.937	1.818.151.688	93,12%	11,82%
2	Meningkatnya iklim investasi	56,50%	18,26%	32,32%	111.030.800	108.671.246	97,87%	-65,55%
3	Meningkatnya penerbitan layanan	86,50%	88,25%	102,02%	134.236.865	126.838.987	94,49%	7,53%

	yang lebih cepat dan tepat							
	Rata-Rata			79,76%			95,16%	

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebanyak 3 (tiga) dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan dengan capaian kinerja sebesar 137,13%.
2. Meningkatkan ekonomi sector unggulan dengan capaian kinerja sebesar 132,2%.
3. Meningkatkan layanan public yang inovatif berbasis e-government dengan capaian kinerja sebesar 111,61%.

Sedangkan sasaran strategis penunjang keberhasilan dari beberapa tujuan tersebut diatas sebanyak 3 (tiga) dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply) dengan capaian kinerja sebesar 104,94% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 93,12%.
2. Meningkatnya iklim investasi dengan capaian kinerja sebesar 32,32% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 97,87%.
3. Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat dengan capaian kinerja sebesar 102,02% dan capaian penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 94,49%.

Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 79,76%, sedangkan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 95,16%. Dengan demikian maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebesar -15,4% atau senilai Rp. 2.053.661.921,-.

Untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis tersebut di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Dengan Program/Kegiatan

No .	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4,94	4,94	100%	1.952.404.937	1.818.151.688	93,12%	6,88%
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	85	85	100%	1.149.240.857	1.032.317.646	89,83%	
	Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	80	80	100%	1.149.240.857	1.032.317.646	89,83%	
	<i>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	85	85	100%	800.284.080	782.954.042	97,83%	
	Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	42	42	100%	800.284.080	782.954.042	97,83%	
	<i>Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>	3,50	3,50	3,50%	2.880.000	2.880.000	100%	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	82	82	100%	2.880.000	2.880.000	100%	

2	Program Penempatan Tenaga Kerja	75,51	75,51	100%	29.998.700	26.701.375	89,01%	10,99%
	<i>Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota</i>	41,26	41,26	100%	29.998.700	26.701.375	89,01%	
	Sub kegiatan penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	30	30	100%	29.998.700	26.701.375	89,01%	
3	Program Hubungan Industrial	100	100	100%	292.282.400	291.158.400	99,62%	0,38%
	<i>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	27	27	100%	4.100.000	4.100.000	100%	
	Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	27	27	100%	4.100.000	4.100.000	100%	
	<i>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	100	100	100%	288.182.400	287.058.400	99,61%	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	22	22	100%	4.800.000	4.800.000	100%	
	Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2274	2274	100%	283.382.400	282.258.400	99,60%	

4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	8.622.448.490	7.766.796.330	90,08%	9,92%
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12	12	100%	5.019.100	4.979.800	99,22%	
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%	3.308.800	3.276.000	99,01%	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	100%	720.800	719.200	99,78%	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%	989.500	984.600	99,50%	
	<i>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	12	12	100%	7.331.537.009	6.516.675.065	88,89%	
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72	72	100%	7.331.537.009	6.516.675.065	88,89%	
	<i>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	1	1	100%	44.055.900	43.456.000	98,64%	
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98	97	98,98%	44.055.900	43.456.000	98,64%	
	<i>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	96	90	93,75%	166.360.200	157.810.806	94,86%	
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	6	100%	14.550.100	14.545.800	99,97%	

	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	6	100%	10.092.650	10.092.500	100%	
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	10	10	100%	20.112.900	20.048.000	99,68%	
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	100%	10.838.200	10.769.000	99,36%	
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	1	100%	27.752.000	20.977.504	75,59%	
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	136	136	100%	81.657.000	80.024.002	98%	
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	12	100%	1.357.350	1.354.000	99,75%	
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5	5	100%	39.274.619	39.108.333	99,58%	
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	5	100%	39.274.619	39.108.333	99,58%	
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3	3	100%	816.153.265	797.037.783	97,66%	
	Sub kegiatan penyediaan surat menyurat	1000	3215	321,5%	1.798.000	1.791.600	99,64%	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	233.562.675	215.107.455	92,10%	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17	17	100%	580.792.590	580.138.728	99,89%	
	<i>Kegiatan Pemeliharaan</i>	6	6	100%	220.048.397	207.728.543	94,40%	

	<i>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>							
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36	28	77,78%	61.060.000	49.786.960	81,54%	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63	59	93,65%	26.180.000	25.154.255	96,08%	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	3	3	100%	132.808.397	132.787.328	99,98%	
5	Program Promosi Penanaman Modal	3,61	3,61	100%	111.030.800	108.671.246	97,87%	2,13%
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2	2	100%	111.030.800	108.671.246	97,87%	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	100%	111.030.800	108.671.246	97,87%	
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	3,61	3,61	100%	134.236.865	126.838.987	94,49%	5,51%
	<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman</i>	6173	14.211	230,21%	134.236.865	126.838.987	94,49%	

	<i>Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>							
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6173	14.211	230,21%	80.991.720	77.439.287	95,61%	
	Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	24	24	100%	44.176.225	40.842.700	92,45%	
	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	11	11	100%	9.068.920	8.557.000	94,36%	
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	83	83	100%	592.378.777	469.809.440	79,31%	20,69%
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	6173	14.211	230,21%	592.378.777	469.809.440	79,31%	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	35	35	100%	174.998.207	129.579.500	74,05%	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	240	240	100%	273.306.970	228.789.640	83,71%	

	Pelaksanaan Penanaman Modal							
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101	101	100%	144.073.600	111.440.300	77,35%	
8	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	87	87	100%	56.732.000	52.951.072	93,34%	6,66%
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100	100	100%	56.732.000	52.951.072	93,34%	
	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	4	100%	56.732.000	52.951.072	93,34%	
9	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	82,50	0	0	2.261.400	0	0	0
	<i>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	3	0	0	2.261.400	0	0	0
	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu)	2	0	0	2.261.400	0	0	0

	Daerah Kabupaten/Ko ta							

Uraian penjelasan tabel :

- Kinerja program “**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**” dengan indikator “Prosentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 93,12% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 6,88% atau senilai Rp. 1.818.151.688,-.
- Kinerja program “**Program Penempatan Tenaga Kerja**” dengan indikator “Persentase pencari kerja yang ditempatkan” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 89,01% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 10,99% atau senilai Rp. 26.701.375,-.
- Kinerja program “**Program Hubungan industrial**” dengan indikator “Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,62% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 0,38% atau senilai Rp. 291.158.400,-.
- Kinerja program “**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**” dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 90,08% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 9,92% atau senilai Rp. 7.766.796.330,-.
- Kinerja program “**Program Promosi Penanaman Modal**” dengan indikator “Persentase Peningkatan Jumlah Investor” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 97,87% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 2,13% atau senilai Rp. 108.671.246,-.

- Kinerja program “**Program Pelayanan Penanaman Modal**” dengan indikator “Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,49% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 5,51% atau senilai Rp. **126.838.987,-**.
- Kinerja program “**Program Pengendalian Penanaman Modal**” dengan indikator “Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 79,31% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 20,69% atau senilai Rp. **469.809.440,-**.
- Kinerja program “**Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**” dengan indikator “Prosentase Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 93,34% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 6,66% atau senilai Rp. **52.951.072,-**.
- Kinerja program “**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**” dengan indikator “Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya” tidak tercapai 0% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 0% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 0% atau senilai Rp. **0,-**, hal ini disebabkan perubahan nomenklatur atas peraturan Menteri keuangan (PMK) no. 212 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Dimana program kegiatan tersebut dilakukan penggabungan dengan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2023 menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 137,13% (kategori rendah) akan tetapi kalau diukur tingkat TPT yang mendapat nilai 1,71% sangat berhasil, karena semakin rendah tingkat TPT maka daerah berhasil menekan tingkat angka pengangguran.
- Tujuan meningkatkan ekonomi sector unggulan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 132,2% (kategori sedang), sama dengan indicator TPT semakin rendah nilai ICOR (tahun 2023 : 4,95%) maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik.
- Tujuan meningkatnya layanan public yang inovatif berbasis e-government dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111,61% (kategori sangat tinggi).

- Sasaran meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja TPAK dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,94% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran meningkatnya iklim investasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja persentase peningkatan realisasi investasi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 32,32% (kategori sangat rendah) pertumbuhan realisasi investasi mengalami penurunan;
- Sasaran meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja SKM dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,02% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program **“Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja”** terdiri dari 3 indikator kinerja dengan rata-rata tercapai 93,12% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program **“Program Penempatan Tenaga Kerja”** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja rata-rata tercapai 89,01% (kategori tinggi).
- Sasaran program **“Program Hubungan industrial”** terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja rata-rata tercapai 99,62% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program **“Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”** terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja rata-rata tercapai 90,08% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program **“Program Promosi Penanaman Modal”** terdiri dari 1 (satu) indikator dengan rata-rata tercapai 97,87% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program **“Program Pelayanan Penanaman Modal”** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja rata-rata tercapai 94,49% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran program **“Program Pengendalian Penanaman Modal”** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja rata-rata tercapai 79,31% (kategori tinggi).
- Sasaran program **“Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal”** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja rata-rata tercapai 93,34% (kategori sangat tinggi).

- Sasaran program “**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata tercapai 0% (kategori sangat rendah), hal ini disebabkan perubahan nomenklatur atas peraturan Menteri keuangan (PMK) no. 212 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Dimana program kegiatan tersebut dilakukan penggabungan dengan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dilaksanakan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran perangkat daerah tersebut, secara umum *telah* mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.793.774.369,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.661.078.538,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 90,39% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 9,61%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2023 kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Sumenep, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP**



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001

